

**KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Di Kepolisian Resor Binjai)**

**Herio Simanjuntak\***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum \*\***

**ABSTRAK**

Penyidik Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengungkap tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan ini mencakup penyelidikan dan penyidikan, serta tindakan lain yang diperlukan dalam proses hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum kewenangan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi, bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Di Kepolisian Resor Binjai, bagaimana hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan AKP Junaidi, Kasi Humas Polres Binjai AKP Polres Binjai. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pengaturan hukum kewenangan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan ini mencakup penyelidikan dan penyidikan, serta tindakan lain yang diperlukan dalam proses hukum. Penyidik Kepolisian memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dan kewenangannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Di Kepolisian Resor Binjai adalah meliputi penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah baik dari aspek internal maupun eksternal. Beberapa hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman hukum yang belum optimal, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi tekanan politik, kurangnya dukungan masyarakat, dan kendala dalam pengumpulan alat bukti

**Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**THE AUTHORITY OF POLICE INVESTIGATIVES IN DISCOVERING  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
(Study at the Binjai Police Resort)**

**Herio Simanjuntak\***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum\*\***

**ABSTRACT**

*Police investigators have the authority to uncover criminal acts of corruption, in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) and other laws and regulations. This authority includes inquiries and inquests, as well as other actions required in the legal process. The problem in this thesis is how the legal regulation of the authority of police investigators to uncover criminal acts of corruption, how the police are tackling corruption in the jurisdiction of the Binjai Police Resort, and what obstacles police investigators face in uncovering criminal acts of corruption.*

*The research conducted was normative and supported by empirical legal data, including interviews with AKP Junaidi, Head of Public Relations at the Binjai Police. The data analysis used was qualitative.*

*The legal provisions governing the authority of police investigators to uncover corruption crimes are in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) and other laws and regulations. This authority encompasses inquiries and inquests, as well as other actions required in the legal process. Police investigators play a crucial role in uncovering corruption crimes, and their authority is regulated by various applicable laws and regulations. Police efforts to combat corruption within the jurisdiction of the Binjai Police Department include prosecution, prevention, and anti-corruption education.*

*The research findings revealed that obstacles for police investigators in uncovering corruption crimes stem from both internal and external factors. Internal obstacles include limited human resources, suboptimal legal understanding, and lack of coordination between agencies. Meanwhile, external obstacles include political pressure, lack of public support, and obstacles in gathering evidence.*

**Keywords: Authority, Investigators, Corruption**

*\*Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*